



Fenomena *Post-Truth* Sebagai Alat Gerakan Sosial Politik Pada Pemilihan Presiden 2019 (Studi Perubahan Sosial)

Sri Utami Wulansari¹, Firdaus W Suhaeb²

¹Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Makassar

E-mail: sriutamiwulansari@gmail.com

²Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Makassar

E-mail: firdauswsuhaeb@unm.ac.id

Abstract. *The main issue addressed in this article revolves around how the post-truth phenomenon serves as a tool for political and social movements during the 2019 presidential election. The aim of this article is to depict the post-truth phenomenon as a vehicle for political and social movements during the 2019 presidential election. This research adopts a qualitative approach using a literature review methodology. The procedural steps carried out in the literature review include: (1) Developing a general understanding of the research topic, (2) Finding information that supports the research topic, (3) Defining the research focus and organizing relevant materials, (4) Seeking and identifying primary data sources such as books and scholarly journal articles, (5) Rearranging materials and notes obtained from data sources, (6) Reviewing the analyzed and relevant information to discuss and address the research problem, (7) Enriching the data sources to reinforce data analysis, and (8) Formulating the research findings. The findings of this article reveal that the key actors in achieving their political and social movement success through the post-truth phenomenon adopt various strategies. These strategies encompass conveying diverse discourses and engaging in mutual subtle criticisms through television and social media platforms such as Facebook, WhatsApp, and others. Consequently, the society is depicted as a black hole that absorbs meanings, information, communications, messages, and the like, eventually rendering them devoid of significance. The society charts its own course, disregarding attempts aimed at manipulating them.*

Keywords: *Post-Truth Phenomenon; Social Political Movement; Presidential Election 2019*

Abstrak. *Masalah utama dalam artikel ini tentang bagaimana fenomena post-truth sebagai alat gerakan sosial politik pada pemilihan presiden 2019. Artikel ini bertujuan untuk mendeksripsikan fenomena post-truth sebagai alat gerakan sosial politik pada pemilihan presiden 2019. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Prosedur yang dilakukan dalam tinjauan literatur meliputi (1) Mengembangkan pemahaman umum tentang topik penelitian, (2) Menemukan informasi yang mendukung topik penelitian, (3) Menentukan fokus penelitian dan menyusun materi yang relevan, (4) Mencari dan menemukan sumber data utama seperti buku dan artikel jurnal ilmiah, (5) Mengatur ulang bahan dan catatan yang diperoleh dari sumber data, (6) Melakukan tinjauan terhadap informasi yang telah dianalisis dan relevan untuk membahas serta menjawab rumusan masalah penelitian, (7) Memperkaya sumber data guna memperkuat analisis data, dan (8) Menyusun hasil penelitian. Hasil artikel ini adalah para aktor dalam mensukseskan gerakan sosial politiknya melalui fenomena post-truth yaitu dengan cara menyampaikan berbagai wacana-wacana, saling sindir menyindir melalui TV dan sosial media baik berupa facebook, whatsapp dan lain lain. Dengan demikian, masyarakat dilihat sebagai lubang hitam yang menyerap sebuah makna, informasi, komunikasi, pesan dan sebagainya, menjadi tidak bermakna. Masyarakat menempuh jalan mereka sendiri, tak mengindahkan upaya yang bertujuan memanipulasi mereka.*

Kata Kunci: *Fenomena Post-Truth; Gerakan Sosial Politik; Pilpres 2019*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi, dan untuk mencapai tingkat demokrasi yang setinggi-tingginya, rakyat Indonesia ikut serta dalam pemilu. Pemilu merupakan sarana yang sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Namun, saat mendekati proses demokrasi, seringkali kita menghadapi tantangan yang signifikan di era kontemporer ini di mana segala sesuatu dapat diakses dengan mudah. Berbagai platform media seperti surat kabar, radio, televisi, dan internet memberi kita akses informasi yang mudah. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar akurat. Dengan munculnya media sosial saat pemilihan presiden, fenomena post-truth semakin meluas jangkauannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keakuratan dan keandalan informasi. Penting untuk mengevaluasi secara kritis informasi yang kita temui untuk menghindari disesatkan atau dipengaruhi oleh narasi palsu.

Post-truth umumnya dikaitkan dengan keyakinan pribadi. Keyakinan di sini mencakup apa yang diyakini seseorang tentang dirinya dan kehidupannya, dan ini mencakup aspek mendasar dari kehidupan manusia, atau keyakinan. Fenomena post-truth tidak terbatas pada isu-isu politik, tetapi merasuk ke ranah sosial. Di Indonesia, berita bohong menyebar melalui media sosial dan masyarakat menyaksikan fenomena post-truth sebagai bagian dari keseharian mereka. Dampak post-truth sangat besar dalam kehidupan sosial masyarakat, karena saat ini sangat sulit untuk membedakan informasi yang benar dengan informasi yang hanya mencari perhatian banyak orang. Oleh karena itu, penting untuk menghindari plagiasi dan memeriksa keaslian setiap informasi yang ditemui.

Dalam pemilu Indonesia serentak 2019, fenomena post-truth menyebar dengan cepat, memengaruhi opini publik dengan klaim seperti Indonesia akan bubar pada 2030, kebangkitan PKI, pencetakan jutaan kartu pemilih, dll. penganiayaan terhadap Ratna. , diantara yang lain. Sarumpat, masuknya pekerja asing, kecurangan pemilu, dan ketidakberpihakan mesin. Virus post-truth juga dimanfaatkan oleh beberapa orang bergelar profesor akademis dan bergelar PhD. Mereka menggunakan alat ilmiah seperti jajak pendapat untuk mendukung kebohongan dan menyebarkan pernyataan politisi lainnya. Salah satu contohnya adalah TKN Prabowo-Sandi yang menggunakan wacana omong kosong sebagai upaya untuk merespons kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Melalui media online, wacana-wacana ini diproduksi dan disebarluaskan berulang kali dengan tujuan mempengaruhi kondisi emosional masyarakat. Sayangnya, mayoritas masyarakat tampaknya lebih cenderung menerima informasi yang telah diubah dan dikemas oleh orang lain daripada melakukan seleksi terhadap informasi dalam jumlah yang besar.

Menurut UNESCO seperti yang dikutip dalam penelitian Etiyanto et al. (2018), Ujaran kebencian didefinisikan sebagai tindakan provokatif yang ditujukan untuk merugikan kelompok sosial atau komunitas tertentu (terutama dalam bentuk diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan). Ini termasuk pernyataan yang mendukung, mengancam, atau mendorong kekerasan. Istilah ini terkadang mencakup ungkapan yang memperkuat prasangka dan intoleransi serta mendorong diskriminasi, permusuhan, dan serangan kekerasan. Secara umum, definisi ujaran kebencian biasanya luas bahkan bisa mencakup kata-kata yang menyinggung pihak berwenang atau individu. Apalagi terkait pemilu, konsep ujaran kebencian rentan dimanipulasi. Tuduhan penghasutan kebencian sering digunakan sebagai senjata antara lawan politik atau oleh mereka yang berkuasa untuk memadamkan perbedaan pendapat dan kritik. Gerakan sosial politik post-truth tidak hanya terbatas pada masyarakat perkotaan, tetapi juga berdampak hingga ke wilayah terpencil. Ini disebabkan oleh antusiasme masyarakat dalam mengikuti informasi terkait pemilihan presiden 2019 melalui televisi dan internet, yang cenderung mempercayai berbagai informasi tanpa memverifikasi kebenarannya.

Penelitian terdahulu yang mengkaji seputar era Post-truth dapat ditemukan antara lain melalui sejumlah studi mengenai jurnalisme data resistensi ruang siberdi era Post-truth (Imawan, 2018), membekali diri untuk menghadapi fenomena Post-truth (Mudawamah, 2018), strategi komunikasi politik digital pasca-kebenaran (Mustaqim, 2018), politisasi agama di tahun politik: politik pasca kebenaran di Indonesia dan ancaman bagi demokrasi (Kurniawan, 2018), desa konstitusi: politik

pemerintahan desa dalam menaggulangi diskurpsi politik identitas dan disintigrasi bangsa di era Post-truth (Firdausy et al, 2019). Kajian yang lebih spesifik membahas pemilihan presiden 2019 di era Post-truth di ulas Jatmiko (2019); Mahatma (2019). Namun kajian yang di ulas Jatmiko (2015) fokus tentang pergolakan wacana politik pilpres 2019. Studi Mahatma (2019) difokuskan mengenai strategi pemenangan pilpres 2019. Sementara artikel ini melengkapi kajian terdahulu. Letak kebaruan (*novelty*) artikel ini lebih fokus memotret fenomena Post-truth sebagai alat gerakan sosial politik pada pemilihan presiden 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Karya referensi dan artikel jurnal ilmiah berfungsi sebagai sumber informasi. Tahapan penelitian ini meliputi mengumpulkan data kepustakaan, membaca dan menyimpan data yang relevan, serta mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Wiratna, 2014: 57).

Prosedur yang dilakukan dalam tinjauan literatur ini meliputi langkah-langkah berikut: (1) Mengembangkan pemahaman umum tentang topik penelitian, (2) Menemukan informasi yang mendukung topik penelitian, (3) Menentukan fokus penelitian dan menyusun materi yang relevan, (4) Mencari dan menemukan sumber data utama seperti buku dan artikel jurnal ilmiah, (5) Mengatur ulang bahan dan catatan yang diperoleh dari sumber data, (6) Melakukan tinjauan terhadap informasi yang telah dianalisis dan relevan untuk membahas serta menjawab rumusan masalah penelitian, (7) Memperkaya sumber data guna memperkuat analisis data, dan (8) Menyusun hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Post-Truth sebagai fenomena Sosial

Asal kata "fenomena" berasal dari bahasa Yunani "phainomenon", yang berarti "apa yang terlihat". Fenomena mengacu pada gejala, fakta, kenyataan, peristiwa, dan hal-hal yang dapat dirasakan oleh panca indera, termasuk hal-hal mistis atau gaib. Kata sifat turunan "fenomenal" mengacu pada sesuatu yang luar biasa. Fenomena dapat terjadi di berbagai tempat yang dapat diamati oleh semua orang. Suatu peristiwa, seperti objek yang terlihat, dapat dipandang sebagai fenomena. Keberadaan suatu objek juga dapat membangkitkan keadaan atau perasaan tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fenomena merujuk pada hal-hal yang dapat diamati dengan panca indera dan dijelaskan secara ilmiah, atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan. KBBI juga menjelaskan bahwa gejala sama dengan fenomena, artinya hal atau keadaan yang tidak biasa dan memerlukan perhatian karena menandakan sesuatu yang sedang terjadi. Definisi fenomena adalah sesuatu yang dapat dirasakan dengan panca indera dan dievaluasi dan dijelaskan secara ilmiah (Lapau, 2012).

Dalam kamus sosiologi dan demografi, fenomena digambarkan sebagai elemen dasar variabel yang dianggap stabil dalam konteks sosiologis. Ilmu yang mempelajari fenomena disebut fenomenologi. Perlu pendekatan ilmiah yang mempersoalkan penyebab gejala atau kejadian tanpa berusaha menjelaskannya. Edmund Husserl memperkenalkan fenomenologi sebagai aliran filsafat dan cara berpikir yang berangkat dari kebenaran fenomena itu sendiri. Fenomena yang terlihat sebenarnya mencerminkan suatu realitas yang berdiri sendiri, karena yang terlihat adalah objek dengan makna transenden.

Post-Truth sebagai fenomena sosial merupakan fakta sosial dalam kehidupan masyarakat, yang terwujud karena adanya bentuk-bentuk perubahan sosial yang ditimbulkan oleh masyarakat. Fenomena ini memberikan dampak negatif, namun ada juga yang memberikan dampak positif yaitu kemampuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan masyarakat.

Menurut KBBI, fenomena sosial adalah peristiwa nyata yang dapat langsung dirasakan melalui panca indera dan dijelaskan melalui penelitian ilmiah. Dalam pengertian ini, jelas bahwa fenomena sosial harus didemonstrasikan melalui langkah penelitian yang sistematis untuk menjelaskan apa yang dilihat. Menurut Freddy Rangkut (2011) fenomena sosial di lapangan merupakan fakta atau peristiwa sosial yang tampak. Fenomena sosial ini mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang dinamika kelompok sosialnya atau menciptakan integritas sosialnya.

Fenomena sosial tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :

1. Faktor kultural adalah faktor yang mengandung nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat
2. Faktor struktural adalah faktor yang mempengaruhi struktur masyarakat yang tersusun oleh suatu pola tertentu.

Post-Truth Alat Gerakan Sosial Politik

Post-Truth atau pasca kebenaran adalah konteks sosio-politik di mana objektivitas dan rasionalitas dikesampingkan demi emosi atau keyakinan, bahkan ketika fakta menunjukkan sebaliknya. Pemilihan presiden 2019 adalah contoh bahwa era ini merupakan instrumen gerakan sosial dan politik. Istilah "post-truth" pertama kali diperkenalkan oleh dramawan Amerika-Serbia Steve Tesich dalam sebuah artikel tahun 1992 di majalah *The Nations* tentang perang Teluk Persia dan Iran. Dalam tulisannya, Tesich mengungkapkan keprihatinannya terhadap perilaku politisi dan pemerintah. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh buku *The Post-Truth Era* oleh penulis Amerika Ralph Keyes mengenai "Ketidakjujuran dan Penipuan dalam Kehidupan Modern" pada tahun 2004. Sejak saat itu, debat post-truth menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat dan pemikir politik. Tidak mengherankan, Kamus Oxford (OD) menamai kata "post-truth" sebagai kata terbaik tahun 2016. Menurut OD, era post-truth dikaitkan dengan kondisi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi.

Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat yang kerap mengklaim pro-demokrasi, fenomena post-truth dimanfaatkan dengan berbagai cara sebagai alat gerakan sosial dan politik. Contohnya adalah pemilihan presiden AS tahun 2016, di mana calon presiden dari partai tertentu, Donald Trump, diduga memanfaatkan era post-truth dengan menyebarkan "berita bohong", yaitu informasi yang sengaja digunakan untuk menipu orang. seperti penggunaan politik identitas yang stereotip dan destruktif. Menariknya, Trump berhasil terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, mengalahkan Hillary Clinton, calon dari Partai Republik, yang mendapat dukungan dari banyak politisi terkemuka dan juga dipengaruhi oleh mantan Presiden Barack Obama. Di Inggris Raya, fenomena post-truth juga memainkan peran penting dalam referendum Brexit, yang berujung pada keputusan untuk keluar dari Uni Eropa.

Post-Truth, juga dikenal sebagai Post-Truth, menggambarkan era di mana fakta dan akal sehat diabaikan atau ditolak. Berita palsu, hoaks, dan teori konspirasi menyebar dengan mudah dan menikmati kepercayaan publik. Terkadang publik malah meragukan berita yang dikonfirmasi oleh media yang kredibel. Akses mudah terhadap teknologi informasi saat ini, terutama melalui media sosial, menjadi perhatian utama dalam menyebarkan realitas pasca-kebenaran. Fenomena pasca-kebenaran ditandai dengan pembenaran atau legitimasi yang bukan berdasarkan substansi kebenaran, namun lebih didasarkan pada opini, hoaks, disinformasi, atau fakta yang dipilih secara selektif. Selanjutnya A. C. Grayling menyoroti penyebaran realitas pasca-kebenaran melalui internet dan media sosial. Di era ini, kesalahan dalam berpikir dan penolakan terhadap rasionalitas menjadi umum.

Menurut Levitin seperti yang dikutip oleh (Mustaqim, 2018) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa era pasca-kebenaran mencerminkan ketidakrasionalan dan meruntuhkan pencapaian-pencapaian yang sudah tercapai dalam kehidupan individu. Terkadang, wartawan tidak ingin menyebut berita palsu sebagai kebohongan, melainkan mereka berupaya membela narasi yang sesuai dengan kebohongan tersebut. Ketika logika diabaikan dan berpikir kritis ditinggalkan,

fenomena pasca-kebenaran berkembang pesat. Kebohongan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, malahan kebohongan menjadi bagian yang solid dalam kehidupan individu.

Menurut D'Ancona (2017), istilah post-truth diperkenalkan oleh Roland Barthes dalam konteks perjuangan. Barthes menyatakan bahwa dalam pergulatan tidak ada yang lebih penting daripada kebenaran teater. Ini adalah rumusan konsep post-truth. Dalam kehidupan yang sebenarnya, kebahagiaan selalu ada, ciptakan sesuatu tanpa dasar yang kokoh dan ciptakan gambar-gambar lucu. Hal ini menunjukkan bahwa di era pasca-kebenaran, citra seringkali mendahului kenyataan. Meski sekilas tidak tampak berbeda dengan postmodernisme, namun keduanya sebenarnya memiliki perbedaan yang signifikan. Post-truth lebih bersifat taktis, sedangkan post-modernisme lebih absurd, padahal realita begitu nyata di depan mata.

Pandangan Prado dalam (Mustaqim, 2018) mengutip editorial majalah The Economist pada bulan Februari 2017 yang menggambarkan pasca-kebenaran sebagai proses di mana "perasaan benar" diinduksi tanpa didasari oleh fakta. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pasca-kebenaran, tidak ada upaya yang serius untuk mencapai faktualitas dan penggunaan informasi yang dapat berdampak pada aktivitas, interaksi, dan politik sosial. Faktualitas bukanlah hanya ungkapan individual, tetapi penggunaan pasca-kebenaran menyiratkan bahwa pendapat tersebut diekspresikan tanpa verifikasi. Faktualitas diabaikan, dan pendapat kehilangan otoritas karena sumbernya tidak diverifikasi. Pemikir Perancis, J.A. Liorente (2017), menjelaskan bahwa era pasca-kebenaran adalah iklim sosial politik di mana obyektivitas dan rasionalitas membiarkan emosi atau hasrat mendominasi keyakinan, meskipun fakta sebenarnya menunjukkan hal yang berbeda.

Salah satu tanda bahwa era pasca-kebenaran menjadi alat gerakan sosial-politik adalah maraknya ujaran kebencian dan berita bohong. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, antara Agustus hingga Desember 2018 terdapat 62 konten hoaks terkait Pemilu 2019. Puncak penyebaran penipuan terjadi pada Desember 2018. Contoh hoaks yang sangat terkenal adalah pesan tujuh kontainer berisi Surat Suara yang seharusnya dicoblos pada Rabu malam (1 Februari 2019). Namun, setelah dilakukan pemeriksaan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara, di mana disebutkan tujuh kontainer itu ternyata hanya menyesatkan.

Kita masih ingat tujuh kontainer yang diduga berisi surat suara coblos. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi masalah server yang digunakan dalam pemilu berada di luar negeri, khususnya di Singapura, dengan tujuan memenangkan salah satu calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dinilai berbahaya karena dapat merusak legitimasi KPU, sehingga KPU melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Mabes Polri pada 4/4/2019.

Fenomena post-truth sebagai instrumen gerakan sosial politik berkembang dengan tujuan yang berbeda-beda. Bahkan dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, diserang. Joko Widodo menghadapi tuduhan terkait PKI, namun ia membantah tuduhan tersebut dengan menegaskan bahwa ia, orang tua dan kerabatnya beragama Islam. Pada saat yang sama, Prabowo dituduh mendukung khilafah dan melarang Tahlila, namun Prabowo membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa ibunya berlatar belakang Kristen dan ia dibesarkan di lingkungan Kristen.

Di era post-truth, ada fenomena bahwa yang benar bisa dianggap salah dan yang salah bisa dianggap benar. Padahal, keduanya bisa disamakan sebagai komunikasi verbal, percakapan atau tindakan nyata. Selama kampanye pemilu, elit politik sering dianggap tidak dapat dipercaya oleh publik, meskipun mereka mengaku berdasarkan data empiris yang valid. Pandangan Haryatmoko dalam Hadisaputra (2019) menunjukkan beberapa inovasi di era post-truth dibandingkan dengan praktik kebohongan yang sudah berlangsung lama dalam politik.

Pertama, berkat digitalisasi komunikasi, akses informasi yang luas memungkinkan akses informasi yang cepat dan mudah. Kedua, masyarakat juga dapat membuat informasi sendiri di media sosial. Ketiga, demokratisasi media dan jurnalisme warga menyeimbangkan ketidakpuasan publik terhadap informasi media dan kekecewaan terhadap politik. Keempat, masyarakat menjadi lebih rentan menerima informasi palsu ketika sebuah komunitas terbentuk dengan ideologi dan kepercayaan yang sama. Hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat membentuk grup virtual berbasis

SARA seperti grup WhatsApp atau Facebook. Kelima, teknologi telah mengubah konsep kebenaran, di mana apa yang disebarluaskan dipandang lebih penting daripada kualitas dan etika informasi. Keenam, kebenaran tidak akan lagi dipalsukan atau diingkari, tetapi kebenaran akan sulit dipertahankan. Bahkan istilah seperti "kebenaran alternatif", "fakta alternatif", dan "penipuan" digunakan sebagai semantik untuk menghindari penggunaan istilah "kebohongan".

2. Pembahasan

Post-Truth Sebagai Alat Gerakan Sosial Politik dalam Persepektif Jean Baudrillard

Dalam teori postmodernisme, Jean Baudrillard memperkenalkan konsep masyarakat simulacrum (simulacra), yang menggambarkan keadaan masyarakat modern saat ini. Masyarakat palsu hidup di bawah kekuasaan media massa dan model virtual dari informasi digital yang tidak memiliki asal atau hubungan dengan realitas aktual. Beginilah ilusi dan fantasi menjadi kenyataan (Mendhy, 2012: 29).

Baudrillard membedakan tiga tingkatan atau urutan simulacrum yang saling mengikuti dan menggantikan. Tingkat pertama diperpanjang dari Renaissance ke awal Revolusi Industri. Pada level ini, formula yang dominan adalah yang palsu, yang masih memiliki asal-usulnya dan tanda-tandanya masih mencerminkan realitas yang mendasarinya. Pandai besi tingkat ini tidak memiliki kendali signifikan atas orang-orang yang terperangkap dalam simulacrum ini. Contohnya terdapat pada imajinasi, imaji, peniruan dan peniruan, yang serasi, optimis dan ingin mengembalikan yang telah hilang. Simulacrum pada titik ini dapat ditemukan dalam tulisan (Selu Margaretha, 2001: 125).

Tingkat kedua adalah era industri, yang dicirikan oleh produksi dan reproduksi murni benda-benda yang sesuai dengan aslinya. Simulacrum zaman itu berbeda atau diwujudkan oleh mesin-mesin produksi, sehingga persoalan energi dan produktivitas modern menggantikan kepercayaan supranatural.

Level ketiga didominasi oleh pembuatan kode dan simulasi menggunakan model sistem industri. Era ini ditandai dengan reproduksi daripada produksi, yang mendominasi era industri. Di sini reproduksi objek menjadi lebih penting daripada pembuatan objek. Prinsip penyalinan sangat didasarkan pada kode (Ritzer, 2003: 65). Generasi ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, komunikasi global, komunikasi massa, konsumerisme dan kapitalisme pasca perang dunia kedua.

Pada level ini, simulacrum digunakan sebagai cara untuk merespon kebutuhan karakter masyarakat konsumen. Sebagai masyarakat yang terus-menerus dihadapkan pada citra dan informasi, simulasi dan citra adalah yang paling menarik dan luar biasa dalam budaya masyarakat postmodern (Chris Barker, 2011: 166). Kalaupun tanda-tanda sebelumnya mengacu pada sesuatu yang nyata, sekarang tanda-tanda itu lebih mengacu pada diri mereka sendiri. Kita tidak dapat lagi membedakan dengan jelas apa yang nyata karena perbedaan antara tanda dan realitas menjadi kabur. Secara umum, dunia postmodern ditandai dengan disintegrasi yang membedakannya dengan ledakan yang menjadi ciri masyarakat modern, misalnya dalam hal sistem produksi, komoditas, teknologi, dan lain-lain. Sebagaimana dunia modern mengalami proses diferensiasi, dapat dicermati bahwa dunia postmodern juga mengalami proses diferensiasi.

Saat garis antara karakter dan kenyataan kabur, semakin sulit untuk mengatakan mana yang nyata dan mana yang hanya simulasi yang berpura-pura asli. Misalnya, Baudrillard berbicara tentang bagaimana televisi melebur ke dalam hidup kita dan bagaimana hidup kita juga menyatu dengan televisi. Alhasil, representasi realitas, yaitu simulasi, menjadi dominan dan kuat. Kita terjebak dalam lingkaran pura-pura tanpa awal dan tanpa akhir, sebuah sistem yang terus berputar.

Pandangan Baudrillard (1983) dalam (Ritzer, 2012) menggambarkan dunia itu sebagai hiperrealitas. Hiperrealitas menciptakan kondisi di mana kepalsuan dan realitas melebur, masa lalu menyatu dengan masa kini, fakta menyatu menjadi perbuatan, tanda menyatu menjadi kenyataan, dan kebohongan menyatu menjadi kebenaran. Tidak terkecuali fenomena post-truth, meskipun berasal dari postmodernisme. Misalnya, pada pemilihan presiden 2019, program berita populer di televisi dan internet adalah contoh nyata bagaimana kebohongan dan misrepresentasi yang

disampaikan kepada publik seakan mendominasi realitas. Dalam hal ini, sulit untuk melihat apa yang sebenarnya benar.

Menurut penulis, teori postmodernisme yang dikemukakan oleh Jean Baudrillard sangat erat kaitannya dengan fenomena post-truth sebagai alat gerakan sosial dan politik di Pilpres 2019. Para aktor gerakan sosial politik menggunakan wacana yang berbeda dan saling mengejek melalui media massa seperti televisi dan media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan sejenisnya. Dalam konteks ini, masyarakat dipandang sebagai keseluruhan yang hanya menyerap makna, informasi, komunikasi dan pesan tanpa makna yang sebenarnya. Terlepas dari upaya manipulasi, orang-orang menempuh jalannya sendiri.

KESIMPULAN

Dalam pemilihan presiden 2019 para aktor dalam mensukseskan gerakan sosial politiknya melalui fenomena *post-truth* yaitu dengan cara menyampaikan berbagai wacana-wacana, saling sindir menyindir melalui TV dan sosial media baik berupa facebook, whatsapp dan lain lain. Dengan demikian, masyarakat dilihat sebagai lubang hitam yang menyerap sebuah makna, informasi, komunikasi, pesan dan sebagainya, menjadi tidak bermakna. Masyarakat menempuh jalan mereka sendiri, tak mengindahkan upaya yang bertujuan memanipulasi dan meruntuhkan dasar-dasar rasionalitas dan objektivitas mereka. Dalam akhirnya, fenomena post-truth menciptakan tantangan serius bagi masyarakat modern dalam menjaga integritas informasi, berpikir kritis, dan mengembangkan pemahaman yang akurat tentang realitas. Upaya untuk mengatasi fenomena ini memerlukan kerja sama dari berbagai sektor masyarakat, termasuk pemerintah, media, dan individu, guna membangun landasan kuat berdasarkan pada fakta dan pengetahuan yang valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Chris Barker. (2011). Cultural Studies. Yogyakarta: Kreasi wacana
- D’Ancona, M., (2017). Post-truth: the new war on truth and how to fight back. London: Ebury Press.
- Etiyanto. (2018). Media Dan Dinamika Sosial Politik Indonesia. Cetakan Pertama. Purwokerto: Literasi Bangsa.
- Firdausy Adriana Grahani et al. (2019). Desa Konstitusi: Politik Pemerintahan Desa dalam Menanggulangi Diskrupsi Politik Identitas dan Disintegrasi Bangsa di Era Post Truth.
- Firdausy et al. (2019). Desa Konstitusi: Politik Pemerintahan Desa Dalam Menanggulangi Diskrupsi Politik Identitas Dan Disintegrasi Bangsa Di Era Post-Truth. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang
- Freddy Rangkuti. (2011). SWOT Balanced Scorecard. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadisaputra. (2019). Pilpres di Era Pasca Kebenaran. <https://fajar.co.id/2019//04/22/pilpres-di-era-pasca-kebenaran/>, diakses, 08 Juni 2023
- Imawan Khaeruddin. (2018). Jurnalisme Data Resistensi Ruang Siber di era Post-Truth. Jurnal Signal Unswagati Cirebon.
- J.A. Llorente, A., González-Agüero, A., Casajus, J. A., & Vicente-Rodriguez, G. (2017). Plyometric exercise and bone health in children and adolescents: a systematic review. World Journal of Pediatrics, 13(2), 112-121.
- Jatmiko, Mochamad Iqbal. (2019). Post-Truth, Media Sosial, Dan Misinformas: Pergolakan wacana Politik Pemilohan Presiden Indonesia Tahun 2019. Jurnal Tabligh
- Kurniawan Budi. (2018). Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi. Jurnal Sosiologi Agama
- Lapau, Buchari. (2012). Metode Penelitian Kesehatan Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan disertai Pedoman bagi Mahasiswa S-1, S-2 dan S-3. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Mahatma Yudhi. (2019). Moral Panic Di Era Pasca Kebenaran, Amplifikasi Moral Panic Terkait Diksi Sontoloyo, Genderuwo Dan Tabok Penyebar Hoax Dalam Strategi Pemengan Pilpres 2019. Prosiding Comnews

- Mudawamah, Nita Siti. (2018). Membekali Diri Untuk Menghadapi Fenomena Post-Truth. Indonesian Journal of Academic Librarianship.
- Mustaqim Andika Hendra. (2018). Strategi Komunikasi Politik Digital Pasca-Kebenaran. Jurnal Dakwah Risalah
- Ritzer, George. (2003). Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ritzer, George. (2012). Teori Sosiologi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Selu Margaretha. (2001). Hiperrealitas dan Ruang Publik. Jakarta: Penaku